



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) 2023**

LPP RRI MANADO

SAMBUTAN KEPALA LPP RRI MANADO

Tahun 2023 telah berakhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja sepanjang tahun 2023, dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Riview atas Laporan Kinerja, Setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja (LAKIP). LAKIP disusun secara sistematis dan terukur, agar mampu memberikan informasi yang transparan dan akuntabel atas kinerja pemerintah berikut hasil-hasil yang dicapainya.

LPP RRI Manado sebagai institusi pemerintah di bawah LPP RRI, tentu berkewajiban pula dalam hal penyusunan LAKIP tersebut. Sebagai suatu organisasi LPP RRI Manado memiliki arah tujuan yang tergambar dari Rencana Strategis yaitu: Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance* khususnya di wilayah layanan siaran RRI Manado yaitu wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)

Pada LAKIP 2023 ini, LPP RRI Manado memberikan gambaran yang konperhensif atas tercapainya target kinerja utama yang dicerminkan dengan pencapaian target IKU, maupun kinerja lainnya yang berupa prestasi dan inovasi di sepanjang tahun 2023. Pada akhirnya, LAKIP LPP RRI Manado 2023 ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi dasar untuk merumuskan langkah-langkah strategi dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik dan berkualitas di masa mendatang.

Manado, 30 Januari 2024

Kepala LPP RRI Manado



Nawir, S.Sos

NIP. 1940307 198303 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja LPP RRI Manado disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX /6/8/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP LPP RRI Manado merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menuju LPP RRI Manado yang akuntabel dan bekerja secara efektif dan efisien serta responsif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang.

Adapun Capaian yang di hasilkan oleh LPP RRI Manado di tahun 2023 sebagai berikut: Pada Semester I menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran Kinerja, dengan 6 indikator kinerja kegiatan dan 14 indikator kinerja kegiatan. Pada semester II terjadi perubahan perjanjian kinerja, dengan rincian menetapkan sebanyak 2 (satu) sasaran kinerja, dengan 13 indikator kinerja/Kegiatan dan 7 indikator kinerja/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditetapkan dalam RENSTRA dan perjanjian Kinerja yang ditetapkan oleh Dirut LPP RRI.

Adapun indikator kinerja satker LPP RRI Manado yang di tuangkan dalam Perjanjian kinerja satker adalah sebagai berikut :

Semester I

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
1.	Program Penyiaran Publik	1.	Peningkatan Kualitas Konten dan kemasan program Jumalistik dan Artistik sebagai pemenuhan kebutuhan atas informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T, berkebutuhan khusus, kaum rentan, dan kaum minoritas	90 Persentase kesesuaian dengan P3SPS Berdasarkan sasaran publik/segmentasi
		2.	Optimalisasi Pengelolaan Konten Media Digital	100%
		3.	Respon Time atas pengaduan pendengar / masyarakat	< 5 Hari Kerja
		4.	Jumlah Program Brand Communication	52 Kegiatan
		5.	Jangkauan siaran berbasis populasi	92%
		6.	Jaminan Kinerja Layanan seluruh Platform RRI (Digital dan Terrestrial)	95%

2.	Program Dukungan Manajemen	1.	Pendapatan PNBP (Sesuai Target yang tercantum dalam DIPA)	686.400.000 Rupiah
		2.	Peningkatan Nilai Kualitas Arsip	B dari Nilai RB
		3.	Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA)	95%
		4.	Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (SMART DJA)	95 Nilai
		5.	Tingkat Penyerapan Anggaran	95%
		6.	Penurunan Jumlah Temuan Audit	<5 Jumlah Item
		7.	Presentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100% dari jumlah pegawai
		8.	Presentase pembuatan SKP pegawai	100% dari jumlah pegawai
		9.	Presentase pengamanan aset	100% dari jumlah aset
		10.	Presentase penyelesaian administrasi aset melalui sertifikasi kepemilikan	100% dari ketepatan waktu penyampaian
		11.	Penyelesaian kasus-kasus aset	100% tertangani
		12.	Presentase upload dokumen yang berkaitan dengan hukum pada website JDIH	100% Dokumen terupload
		13.	Presentase dokumen/arsip yang digitalisasi	100% Dokumen yang digitalisasi
		14.	Presentase pengadaan barang/jasa yang melalui e-katalog/Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan)	2 Paket Pengadaan

Tabel i Perjanjian Kinerja Semester I tahun 2023

Pada **Semester II** terjadi perubahan perjanjian kinerja sebagai berikut :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	1.	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100%
		2.	Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas
		3.	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100%
		4.	Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif
		5.	Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100%
		6.	Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92%
		7.	Jumlah konten yang diupload di medsos official	400
		8.	Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52
		9.	Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker	26
		10.	Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal	52
		11.	Jumlah siaran program tanggap bencana	52
		12.	Jumlah siaran berjaringan satker	365
		13.	Persentase realisasi PNB	60%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	1.	Nilai IKPA	95
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	95
		3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	65
		4.	Nilai SPIP Terintegrasi	3
		5.	Jumlah dokumen <i>risk register</i> satker	1
		6.	Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100
		7.	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100

Tabel ii Perjanjian Kinerja Semester II tahun 2023

Dari indikator perjanjian kinerja satker secara umum pencapaian tujuan sasaran yang tertuang di dalam perjanjian kinerja memperoleh hasil sebesar 85.60% dengan predikat Sangat Baik, data ini dapat dari hasil pengelolaan kinerja yang di input di Aplikasi Sisporja (Sistem pelaporan Kinerja) yang dibuat oleh Kantor Pusat LPP RRI, Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh satker LPP RRI baik di Pusat maupun di daerah untuk mengukur kinerja satker dengan dilampirkan bukti evidennya sebagai dasar evaluasi kinerja dari tim APIP SPI.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA.....	II
LPP RRI MANADO	II
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA	2
1.3 ISU STRATEGIS	5
1.4 LANDASAN HUKUM	5
1.5 SISTEMATIKA.....	6
BAB II.....	7
PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	8
BAB III	10
AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	11
3.1.1 Program Penyiaran Publik.....	12
3.1.2 Tata Kelola Satuan Kerja Daerah	17
BAB IV	22
PENUTUP	22
LAMPIRAN	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, LPP RRI (Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Lembaga sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan lembaga, capaian tujuan dan sasaran lembaga yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian/Lembaga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP LPP RRI khususnya LAKIP LPP RRI Manado dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran LPP RRI Manado yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja LPP RRI Manado.

1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia nomor 09 Tahun 2022 tentang sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Unit Organisasi Satker memiliki mekanisme kerja sebagai berikut:

Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan. Dengan penyederhanaan birokrasi, setiap satuan kerja terdiri dari 2 level struktur dan tim kerja yang terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana. Tim kerja terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih Jabatan Fungsional atau pelaksana yang dapat berasal dari lintas satuan kerja atau jika dibutuhkan dapat berasal dari lintas Instansi. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk tim kerja dapat dipimpin oleh Ketua Tim.

Mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari Pejabat Level 1 dan/atau Pejabat Level 2. Pejabat-pejabat tersebut memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola dan sumber daya yang optimal, serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada.

Adapun mekanisme kerja paska penyederhanaan struktur organisasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja organisasi dapat dilakukan secara sistematis serta logis untuk mencapai tujuan dengan hasil konkrit adalah rencana kerja. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan di antaranya:

- a. Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, perumusan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana di bawah koordinasi Pejabat Level 2 oleh Pejabat Level 1.
- b. Penyusunan strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Level 2 yang terdiri dari penentuan pelaksanaan tugas dalam bentuk tim kerja atau individu, penentuan kebutuhan pelibatan Pejabat Fungsional atau pelaksana lintas unit serta kebutuhan atas Ketua Tim.
- c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan dimaksudkan untuk memastikan kegiatan dan anggaran dijalankan sesuai dengan rencana, dengan rincian:

- a. Penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan, pembagian peran dan pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- b. Monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan oleh Pejabat Level 2 dan/atau Ketua Tim.
- c. Penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Level 2.

3. Tahapan Evaluasi

Tahapan Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan evaluasi adalah revidi atas hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja atau individu oleh Pejabat Level 2 dan Pejabat Level 1. Pelaksanaan kegiatan dinyatakan selesai setelah Pejabat Level 1 menerima hasil pelaksanaan kegiatan dan dinyatakan telah sesuai dengan target yang diharapkan.

Struktur Organisasi LPP RRI Manado dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini :



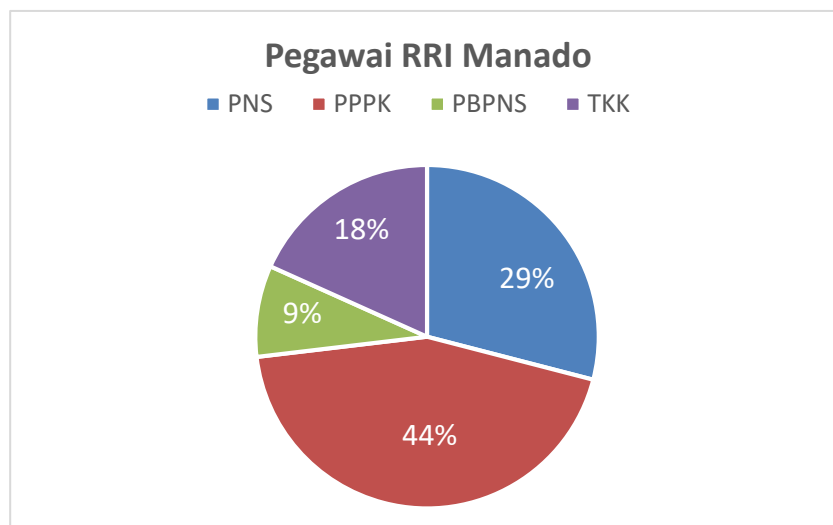
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satker LPP RRI

Satker terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Untuk mendukung program penyederhanaan birokrasi, dilakukan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, sekaligus untuk mendorong proses tata laksana pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menciptakan

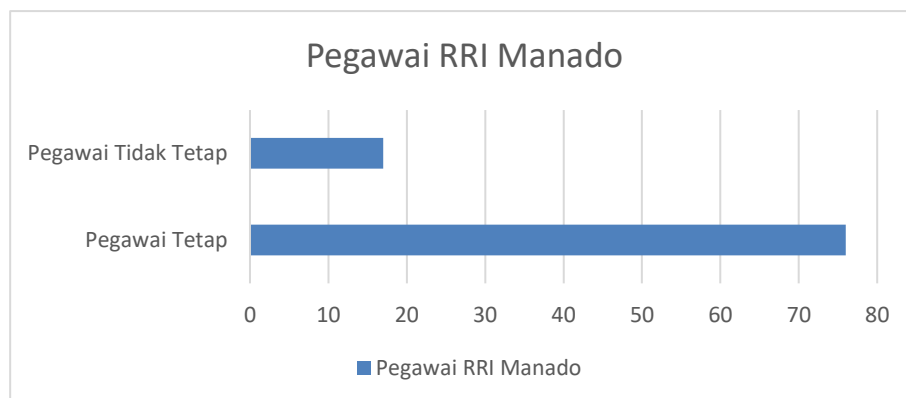
iklim budaya baru pelayanan publik yang lebih baik khususnya untuk perbaikan di Unit Organisasi Satker.

Sistem kerja paska penyederhanaan struktur organisasi disesuaikan dengan strategi dari Direktur Utama dan/atau Direktur Keuangan di mana Direktur Utama dan Direktur Keuangan memastikan kesiapan dukungan infrastruktur, tata kelola, dan sumber daya yang optimal serta memastikan kolaborasi dan sinergitas pelaksanaan tugas yang ada.

Dalam mendukung kegiatan di Satker, berikut lampiran data pegawai dan sarana prasarana yang berada di Satker LPP RRI Manado:



Gambar 1.2 Data Pegawai Satker per 31 Desember 2023



Gambar 1.3 Data Pegawai Tetap dan Tidak Tetap RRI Manado per 31 Desember 2023

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh LPP RRI, yakni Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio, serta Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip *good public governance*. Sasaran Strategis LPP RRI dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip <i>good public governance</i>	1. Tersedianya akses dan program informasi yang akurat, mempunyai nilai, pendidikan dan hiburan yang sehat guna mendukung program negara melalui layanan siaran radio 2. Terwujudnya tata kelola LPP RRI berdasarkan prinsip <i>good public governance</i>

Tabel 1.1 Sasaran Strategis LPP RRI

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Satker LPP RRI ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.5 Sistematika

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker LPP RRI Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Satker, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENGHARGAAN
	Meliputi Penghargaan yang diterima LPP RRI Manado Periode Januari – Desember 2023
BAB V	PENUTUP
	Meliputi rangkuman capaian kinerja tahun 2023, perbandingan kinerja tahun 2022 dan 2023 dan rencana tindak lanjut ke depan terkait peningkatan kinerja satker

Tabel 1.2 Sistematika Penulisan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (RENSTRA) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2020-2024 merupakan arah dan kebijakan LPP RRI 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai program dan kegiatan dirancang dan dirumuskan selaras dan terintegrasi dengan upaya RRI dalam mendukung Program Prioritas Nasional (PN). Dokumen ini menjadi pedoman bagi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan RRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Yang Terpercaya dan Mendunia, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Keberhasilan dalam mewujudkan tujuan memberikan layanan informasi yang Independen, netral dan akurat, mempunyai nilai pendidikan, dan hiburan yang sehat yang menjunjung tinggi keberagaman, identitas nasional, dan mendukung diplomasi Indonesia di tingkat global dengan berpegang pada prinsip *good public governance*, dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi yang meliputi:

1. Menjadikan RRI sebagai media utama dalam peningkatan literasi masyarakat dan radio rujukan pengetahuan yang aktual, faktual dan kredibel, melalui peningkatan kualitas isi/program siaran. Konten yang disiarkan akan selalu mengedepankan pengetahuan dan berbasis riset, sehingga selain berkualitas juga dapat menjadi sumber wawasan pengetahuan baru.
2. Menjadikan RRI sebagai media rujukan utama berita dan informasi yang akurat, netral, independen, dan objektif.
3. Menjadi radio publik yang terdepan terkait konten-konten kebudayaan dalam rangka membangun identitas bangsa, memperkuat jati diri dan budaya bangsa, serta mengembangkan dan melestarikan kearifan lokal melalui berbagai acara siaran, melalui optimalisasi program khusus budaya, Programa 4 (Pro-4) dengan tagline “Ensiklopedi budaya keindonesiaan”.
4. Melakukan diversifikasi usaha dengan melakukan transformasi digital dalam penyiaran radio dengan memanfaatkan infrastruktur TIK dalam meningkatkan

layanan informasi dan hiburan berbasis multiplatform, serta meningkatkan fasilitas pendukung transformasi penyiaran radio digital di seluruh Indonesia.

5. Menjadi radio tanggap bencana sebagai media rujukan utama mitigasi bencana. Strategi ini kedepannya akan menjadikan RRI sebagai media EWS dan sarana literasi tanggap bencana bagi masyarakat. Salah satunya dengan merancang dan melaksanakan program siaran khusus mitigasi bencana melalui acara siaran Radio Tanggap Bencana “KENTONGAN” di RRI seluruh Indonesia.
6. Memperkuat dan meningkatkan peran Stasiun Siaran Luar Negeri RRI sebagai radio diplomasi bangsa (second track diplomacy), melalui layanan siaran dalam 9 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Mandarin, Bahasa Jepang, Bahasa Arab, Bahasa Belanda, Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol, guna mendukung program prioritas nasional dalam “Meningkatkan Citra Positif Indonesia di Luar Negeri”.
7. Mewujudkan tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta berorientasi pelayanan.

Strategi yang ditetapkan dalam Renstra LPP RRI 2020-2024 dalam rangka mendukung 4 (empat) agenda pembangunan nasional yang menjadi acuan Lembaga Penyiaran Publik RRI dalam menjalankan peran dan fungsinya, meliputi: (1) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa; (2) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (3) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan (4) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	1.	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100%
		2.	Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas
		3.	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100%
		4.	Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif
		5.	Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100%
		6.	Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92%
		7.	Jumlah konten yang diupload di medsos official	400
		8.	Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52
		9.	Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker	26
		10.	Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal	52
		11.	Jumlah siaran program tanggap bencana	52
		12.	Jumlah siaran berjaringan satker	365
		13.	Persentase realisasi PNB	60%
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	1.	Nilai IKPA	95
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	95
		3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	65
		4.	Nilai SPIP Terintegrasi	3
		5.	Jumlah dokumen <i>risk register</i> satker	1
		6.	Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100
		7.	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Sumber: Aplikasi SISPORJA)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi Amanah. selaku pengemban amanah Direktur Keuangan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satker LPP RRI MANADO yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi LPP RRI .

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

No	Kategori	Rata-rata % Capaian
1	Sangat memuaskan	$100 \leq X \leq 120$
2	Memuaskan	$90 \leq X \leq 100$
3	Sangat Baik	$80 \leq X \leq 90$
4	Baik	$70 \leq X \leq 80$
5	Cukup	$60 \leq X \leq 70$
6	Kurang	$X < 60$

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, LAKIP LPP RRI MANADO dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja LPP RRI Manado dan Indikator Kinerja Utama atau Indikator Program/Kegiatan.

3.1 Capaian Kinerja

Direktur Utama LPP RRI menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari Satker LPP RRI, dimana kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU (Indikator Kinerja Utama) dalam hal ini yang terlihat pada indikator Program/Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Satker LPP RRI. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas, dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas IKU Satker Semester II menunjukkan hasil sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Tahunan
Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100%	100	100%
Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas	Puas	100%
Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100%	100	100%
Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif	Informatif	100%
Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100%	100	100%
Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92%	92	100%

Jumlah konten yang diupload di medsos official	400	527	131.75%
Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52	50	96.15%
Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan di setiap satker	26	12	46.15 %
Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal	52	50	96.15%
Jumlah siaran program tanggap bencana	52	52	100%
Jumlah siaran berjaringan satker	365	288	78.90%
Persentase realisasi PNPB	60%	29.86	48.33%
Nilai IKPA	95	96.95	101.05%
Nilai Kinerja Anggaran	95	99.35	104.21%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	65	74.5	113.85%
Nilai SPIP Terintegrasi	3	4.2387	133.33%
Jumlah dokumen <i>risk register</i> satker	1	1	100%
Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100	5	5%
Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100	91	91%

Tabel 3.2 Realisasi atas Perjanjian Kinerja Semester II tahun 2023

Adapun penjabaran tiap indikator kinerja yang dihasilkan oleh LPP RRI Manado, dapat kami jabarkan di bawah ini:

3.1.1 Program Penyiaran Publik

1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100%	100%

2. Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker

Pengukuran Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker memiliki target puas. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat ini, RRI Manado melakukan survei menggunakan googleform yang disebar ke pendengar dan pengguna layanan RRI Manado. Survei ini hanya mampu menjangkau di daerah perkotaan, sangat tidak memungkinkan menjangkau di daerah pelosok.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas	Puas

3. Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100%	100%

4. Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan	Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif	Informatif

standar program siaran			
------------------------	--	--	--

5. Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100%	100%

6. Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92%	92

Capaian jangkauan siaran RRI Manado ini dapat terlihat dari Stasiun Pemancar yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

- a. Manado Pro 1 (10 KW, 250 KM 6B)
- b. Manado Pro 2 (5KW, 150 KM 6B)
- c. Manado Pro 4 (3KW, 150KM 4B)
- d. Makawembeng Pro 1 (1KW, 150KM 4B)
- e. Boroko Pro 1 (100W, 50 KM 2B)
- f. SP Talaud Pro 1 (5KW, 100KM 4B)
- g. Relay Miangas Pro 1 (1KW, 50KM 4B)

7. Jumlah konten yang diupload di medsos official

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Jumlah konten yang diupload di medsos official	400	527

8. Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional

Dalam mendukung Program Prioritas Nasional, RRI Manado telah melaksanakan program Parlemen Menjawab, Gerakan Cerdas Memilih dan Program Tanggap Bencana.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52	50

9. Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker	26	12

10. Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal	52	50

11. Jumlah siaran program tanggap bencana

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Jumlah siaran program tanggap bencana	52	52

12. Jumlah siaran berjaringan satker

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Jumlah siaran berjaringan satker	365	288

Siaran berjaringan satker RRI Manado merupakan siaran Lintas Berita “MAGOTA” (Manado, Gorontalo, Talaud) yang dilakukan 24 kali dalam sebulan dari hari senin sampai hari jum’at.

13. Persentase realisasi PNB

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	Persentase realisasi PNB	60%	29.86%

Detail Capaian PNB Perbandingan 2022 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Bulan	2022	2023
1.	Januari	18,546,500	11,702,000
2.	Februari	2,340,000	3,545,000
3.	Maret	19,060,000	9,395,000
4.	April	11,625,000	8,735,000
5.	Mei	2,000,000	5,070,000
6.	Juni	25,755,000	14,460,000
7.	Juli	31,573,000	4,585,000
8.	Agustus	734,750,000	16,910,000
9.	September	3,645,000	11,815,000
10.	Oktober	307,940,000	19,780,000
11.	November	35,645,000	23,140,000
12.	Desember	451,295,000	75,967,000
	Jumlah	1,644,174,500	205,104,000

Pendapatan PNB pada tahun 2023 dengan capaian Rp 205.104.000,- mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2022 terdapat pendapatan dari sewa tower dan sewa lahan untuk toko Indomaret yang sudah dibayar dimuka untuk kontrak selama 3 tahun.

3.1.2 Tata Kelola Satuan Kerja Daerah

1. Nilai IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-

5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA.

Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada Satker. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA: 10 persen
- b. Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen
- c. Penyerapan Anggaran: 20 persen
- d. Belanja Kontraktual: 10 persen
- e. Penyelesaian Tagihan: 10 persen
- f. Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen
- g. Dispensasi SPM: 5 persen
- h. Capaian Output: 25 persen
- i.

Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN yang dapat diakses pada <http://spanint.kemenkeu.go.id/>. Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; dan
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70 .

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Nilai IKPA	95	96.95

Adapun rincian nilai IKPA sebagai berikut:

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	049	116	700137	RRI MANADO	Nilai	100.00	78.57	95.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.95	100%	96.95
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	7.86	19.09	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	89.29			99.09				100.00			

2. Nilai Kinerja Anggaran

Nilai kinerja anggaran LPP RRI Manado adalah jumlah antara Nilai Capaian SMART dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Capaian indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel dibawah ini kemudian diikuti dengan penjelasan hasil kegiatan dalam rangka capaian indikator kinerja ini.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Nilai Kinerja Anggaran	95	99.35

Pelaksanaan Program Kerja pada Tahun Anggaran 2023 berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Per. 66/PB/2005 beserta perubahannya tentang petunjuk teknis mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN.

Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11,754,981,000,-. Pagu dana tersebut berasal dari Rupiah Murni sebesar Rp 11,754,981,000,-.

Realisasi Program LPP RRI Manado Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Total Pagu (Rp)	Total Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Pegawai	7,370,426,000	7,329,716,039	99.45	40,709,961
2.	Belanja Barang	4,384,555,000	4,349,394,039	99.20	35,160,961
	Jumlah	11,754,981,000	11,679,110,078	99.35	75,870,922

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. 11,679,110,078,- atau sebesar 99.35%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 75,870,922,-.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja	65	74.5

Data Nilai Akuntabilitas Kinerja bisa dilihat pada link berikut:

<https://drive.rri.go.id/index.php/s/bPHgQxkFt4p756Z>

4. Nilai SPIP Terintegrasi

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Nilai SPIP Terintegrasi	3	4.2387

Data nilai SPIP terintegrasi bisa dilihat pada link berikut:

<https://drive.rri.go.id/index.php/s/yDFLrHwJN7occMX>

5. Jumlah dokumen *risk register* satker

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Jumlah dokumen risk register satker	1	1

Data risk register RRI Manado bisa dilihat pada link berikut:

<https://drive.rri.go.id/index.php/s/TWtZ4MJBwibjHyR>

6. Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI

Pada bulan Mei tahun 2023 terdapat temuan dari hasil audit SPI kepada LPP RRI Manado. Hasil temuan audit berupa kurangnya Pencatatan dan Pengorganisasian BMN yang rusak, kelemahan dalam Tata Kelola Keuangan, belum dibuatnya kontrak perpanjangan sewa lahan kios untuk PNBK, operasional siaran, dan masih terdapatnya blank spot di daerah Sulawesi Utara. LPP RRI Manado telah melakukan tindakan lanjut terhadap hasil temuan oleh SPI dan terus meningkatkan kualitas tata Kelola satuan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100	5

Data hasil audit SPI RRI Manado lebih lengkap, bisa dilihat pada link berikut:

<https://drive.rri.go.id/index.php/s/magT66d5tFdRALW>

7. Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya

LPP RRI Manado terus berkomitmen meningkatkan kualitas SDM dengan mengikuti diklat kepelatihan kepada para pegawai.

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100	91

Data persentase SDM RRI Manado yang ditingkatkan Kompetensinya bisa dilihat pada link berikut:

<https://drive.rri.go.id/index.php/s/jTY48WX6zXjRgND>

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPP RRI Manado Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik Satker LPP RRI Tahun 2023. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Satker LPP RRI Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Satker dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 LPP RRI Manado menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 2 Sasaran Kegiatan dengan 20 indikator kinerja/Kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran yang tertuang di dalam perjanjian kinerja memperoleh hasil sebesar 78.91% pada semester I dan semester II sebesar 92.29% sehingga total perolehan nilai setahun sebesar 85.60% dengan predikat Sangat Baik, data ini didapat dari hasil pengelolaan kinerja yang di input di Aplikasi Sisporja (Sistem Pelaporan Kinerja) yang di buat oleh Kantor Pusat LPP RRI, yang di peruntukkan bagi seluruh satker LPP RRI baik di Pusat maupun di daerah.

Realisasi Perjanjian Kinerja Semester I sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Program Penyiaran Publik	1.	Peningkatan Kualitas Konten dan kemasan program Jumalistik dan Artistik sebagai pemenuhan kebutuhan atas informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di wilayah 3T, berkebutuhan khusus, kaum rentan, dan kaum minoritas	90 Persentase kesesuaian dengan P3SPS Berdasarkan sasaran publik/segmentasi	80
		2.	Optimalisasi Pengelolaan Konten Media Digital	100%	100

		3.	Respon Time atas pengaduan pendengar / masyarakat	< 5 Hari Kerja	0
		4.	Jumlah Program Brand Communication	52 Kegiatan	33
		5.	Jangkauan siaran berbasis populasi	92%	92
		6.	Jaminan Kinerja Layanan seluruh Platform RRI (Digital dan Terrestrial)	95%	95
2.	Program Dukungan Manajemen	1.	Pendapatan PNBPN (Sesuai Target yang tercantum dalam DIPA)	686.400.000 Rupiah	52.907.000 Rupiah
		2.	Peningkatan Nilai Kualitas Arsip	B dari Nilai RB	74.5
		3.	Peningkatan Akurasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Nilai IKPA)	95%	85.15
		4.	Penilaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (SMART DJA)	95 Nilai	51.82
		5.	Tingkat Penyerapan Anggaran	95%	46.92
		6.	Penurunan Jumlah Temuan Audit	<5 Jumlah Item	5
		7.	Presentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100% dari jumlah pegawai	13
		8.	Presentase pembuatan SKP pegawai	100% dari jumlah pegawai	100
		9.	Presentase pengamanan aset	100% dari jumlah aset	100
		10.	Presentase penyelesaian administrasi aset melalui sertifikasi kepemilikan	100% dari ketepatan waktu penyampaian	100
		11.	Penyelesaian kasus-kasus aset	100% tertangani	100
		12.	Presentase upload dokumen yang berkaitan dengan hukum pada website JDIH	100% Dokumen terupload	0
		13.	Presentase dokumen/arsip yang digitalisasi	100% Dokumen yang digitalisasi	49.98

		14.	Presentase pengadaan barang/jasa yang melalui e-katalog/Belanja Langsung Pengadaan (Bela Pengadaan)	2 Paket Pengadaan	4
Nilai Akhir					78.91%

Realisasi Perjanjian Kinerja Semester II sebagai berikut:

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja		Target	Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas layanan siaran di berbagai platform sesuai standar pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran	1.	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada buku pedoman siaran	100%	100
		2.	Skala hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas program yang disiarkan satker	Puas	Puas
		3.	Persentase tingkat kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan pada Buku Gaya yang diupload KBRN	100%	100
		4.	Nilai kualitas layanan informasi publik (PPID)	Informatif	Informatif
		5.	Persentase keterwakilan wilayah layanan siaran dalam konten berita KBRN	100%	100
		6.	Persentase Jangkauan siaran berbasis populasi	92%	92
		7.	Jumlah konten yang diupload di medsos official	400	527
		8.	Jumlah siaran yang mendukung pencapaian prioritas nasional	52	52
		9.	Jumlah siaran budaya yang diselenggarakan disetiap satker	26	12
		10.	Jumlah siaran yang mampu merepresentasikan komunitas lokal	52	50
		11.	Jumlah siaran program tanggap bencana	52	52
		12.	Jumlah siaran berjaringan satker	365	288
		13.	Persentase realisasi PNB	60%	29.86
2.	Meningkatnya	1.	Nilai IKPA	95	96.95
		2.	Nilai Kinerja Anggaran	95	99.35

kualitas tata kelola Satuan Kerja Daerah	3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	65	74.5
	4.	Nilai SPIP Terintegrasi	3	4.2387
	5.	Jumlah dokumen <i>risk register</i> satker	1	1
	6.	Persentase TL temuan hasil audit BPK dan SPI	100	5
	7.	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	100	91
Nilai Akhir				92.29%

Dalam rangka pencapaian kinerja selama kurun waktu satu tahun, yaitu Tahun 2023, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja yang dilakukan pada Tahun 2023.

Terkait target PNBPN yang telah ditetapkan, PNBPN LPP RRI Manado tahun 2023 masih jauh dari target yaitu sebesar Rp 205.104.000,- atau 29.86%. Hal ini disebabkan adanya pendapatan dari sewa tower dan sewa lahan untuk toko Indomaret yang sudah dibayar dimuka pada tahun 2022 untuk kontrak selama 3 tahun. Kedepan kinerja yang belum optimal akan dievaluasi dan segera dibuat RATL rencana aksi tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerjanya.

Terkait dengan anggaran, perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara optimal, sehingga dalam pelaksanaan beberapa program kegiatan masih harus dilakukan penyesuaian (revisi).

Terkait jangkauan siaran LPP RRI Manado masih adanya daerah Blank spot di wilayah layanan Siaran LPP RRI Manado Manado dikarenakan kontur wilayah yang berbukit dan kemampuan pemancar RRI yang kapasitas jangkauannya kurang.

Langkah kedepan segera dibuat RATL rencana aksi tindak lanjut untuk peningkatan capaian kinerjanya, terkait peningkatan target PNBPN LPP RRI Manado berupa rencana aksi:

1. Mengoptimalkan peran seksi LPU untuk berkolaborasi dengan stakeholder baik Pemerintah Daerah maupun mitra kerja instansi vertikal dan pihak swasta untuk melakukan sosialisasi program-programnya dan mengiklankan produk-produknya di RRI Manado.
2. Membuat company profil yang mencerminkan kekuatan LPP RRI Manado dan dapat meyakinkan bahwa RRI Manado dapat membantu mempublikasikan program dan produk dari mitra kerja.

3. Menambah personal tenaga marketing dengan melakukan anjab dan ABK dari seksi dan subbag yang kelebihan personal.

Sedangkan untuk mengatasi daerah blank spot di beberapa wilayah yang menjadi jangkauan layanan siaran RRI Manado, rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan pemancar yang dimiliki LPP RRI Manado dengan cara melakukan pemeliharaan secara berkala dan memaksimalkan kapasitas Pemancar yang ada.
2. Mengusulkan pengadaan pemancar baru dengan kapasitas yang memadai untuk melayani wilayah - wilayah yang jangkauan siarannya hampir 200 kali lipat dari wilayah Manado.

LAMPIRAN

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (116) KANTOR PUSAT RRI

UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA

SATUAN KERJA : (700137) RRI MANADO

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/01/24 1:45 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,686,000	0	1,686,000	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	2,200,000	(2,200,000)	(100.00)
Piutang Bukan Pajak	250,000,000	250,000,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(250,000,000)	(250,000,000)	0	0.00
Persediaan	13,780,486	37,870,300	(24,089,814)	(63.61)
JUMLAH ASET LANCAR	15,466,486	40,070,300	(24,603,814)	(61.40)
ASET TETAP				
Tanah	240,925,039,139	240,925,039,139	0	0.00
Peralatan dan Mesin	20,872,101,726	21,403,495,463	(531,393,737)	(2.48)
Gedung dan Bangunan	16,931,635,314	15,796,875,787	1,134,759,527	7.18
Jalan, Irigasi dan Jaringan	82,330,000	82,330,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	67,900,000	67,900,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(23,417,040,207)	(21,893,423,543)	(1,523,616,664)	6.96
JUMLAH ASET TETAP	255,461,965,972	256,382,216,846	(920,250,874)	(0.36)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	27,300,000	27,300,000	0	0.00
Aset Lain-lain	791,034,200	791,034,200	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(808,096,700)	(801,271,700)	(6,825,000)	0.85
JUMLAH ASET LAINNYA	10,237,500	17,062,500	(6,825,000)	(40.00)
JUMLAH ASET	255,487,669,958	256,439,349,646	(951,679,688)	(0.37)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,373,500	12,966,873	(11,593,373)	(89.41)
Pendapatan Diterima Dimuka	786,666,668	943,333,334	(156,666,666)	(16.61)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	788,040,168	956,300,207	(168,260,039)	(17.59)
JUMLAH KEWAJIBAN	788,040,168	956,300,207	(168,260,039)	(17.59)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	254,699,629,790	255,483,049,439	(783,419,649)	(0.31)
JUMLAH EKUITAS	254,699,629,790	255,483,049,439	(783,419,649)	(0.31)
JUMLAH EKUITAS	254,699,629,790	255,483,049,439	(783,419,649)	(0.31)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	255,487,669,958	256,439,349,646	(951,679,688)	(0.37)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (116) KANTOR PUSAT RRI
UNIT ORGANISASI : (01) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
WILAYAH/PROVINSI : (1700) SULAWESI UTARA
SATUAN KERJA : (700137) RRI MANADO

Tgl Data : 30/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 30/01/24 1:45 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :
FINAL

Manado, 30 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. NAWIR, S.SOS
196403071983031002